
Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kota Kupang

Government Expenditure, Economic Growth, and Employment Opportunities in Kupang City

Frits O Fanggidae

Fakultas Ekonomi Unkris Artha Wacana- Kupang

e-mail: fofarthawacana@yahoo.com

Abstract. *Government expenditure is one of the regional fiscal strengths used by regional governments in implementing development. Based on the performance budget principle, every spent must be measured by certain performance. In the economic field, the performance of the government expenditures, among others, is measured by economic growth and employment opportunities. This study uses 3 (three) variables, namely employment opportunity (dependent variable), government expenditure (independent variable) and economic growth (intervening variables). By using secondary data (2008-2017) and regression analysis, it was concluded that the government expenditure did not affect employment opportunities through economic growth. This is because the portion of government expenditure for capital expenditure is very small, so it does not lead to the formation of gross fixed capital (infrastructure) and the formation of human capital (technical skills) to encourage economic growth and employment opportunity.*

Keywords: government spending; economic growth; employment opportunity

Abstrak. Belanja daerah adalah salah satu kekuatan fiskal daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan prinsip *performance budget*, setiap rupiah yang dibelanjakan harus diukur dengan kinerja tertentu. Di bidang ekonomi, kinerja belanja daerah antara lain diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu kesempatan kerja (variabel dependen), belanja daerah (variabel independen) dan pertumbuhan ekonomi (intervening variabel). Dengan menggunakan data sekunder runtut waktu (2008-2017) dan analisis regresi, disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan porsi belanja daerah untuk belanja modal sangat kecil, sehingga tidak mengarah pada pembentukan modal tetap bruto (infrastruktur) dan pembentukan modal manusia (*technical skill*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Kata kunci: belanja daerah; pertumbuhan ekonomi; kesempatan kerja.

PENDAHULUAN

Kekuatan Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga Kota Kupang adalah melalui pemanfaatan kekuatan fiskal yang dimilikinya. Kekuatan fiskal yang dimaksud tampak pada besaran belanja daerah yang dimanfaatkan setiap tahunnya. Berdasarkan prinsip *performace budget* (lihat Mahmudi, 2017), setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur kinerjanya. Dengan lain kata, jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah daerah setiap tahunnya, harus menunjuk pada kinerja yang menjadi patokan keberhasilan pemanfaatannya.

Di bidang ekonomi, indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan kehidupan banyak orang antara lain pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan banyak kesempatan kerja, sehingga banyak orang-orang memiliki pekerjaan dan penghasilan. Adanya penghasilan menciptakan permintaan agregat untuk mendorong produksi, yang selanjutnya menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Inilah *multiplier effect*, sekaligus merupakan kinerja yang diharapkan dari belanja pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu (Hendarmin, 2012; Harijono dan Utama, 2013) membuktikan bahwa di Provinsi Bali dan Kalimantan Barat, belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (Kota Kupang DA, 2009 dan 2018), pada tahun 2008, penduduk usia kerja (15-64 tahun) di Kota Kupang berjumlah 208.958 orang, terdiri dari angkatan kerja sebanyak 120.511 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 88.447 orang. Angkatan kerja sebanyak 120.511 orang tersebut, hanya 108.084 (89,69%) yang bekerja, sisanya 10,31% tidak bekerja (menganggur). Pada tahun 2017, dari angkatan kerja sebanyak 179.561 orang, hanya 157.119 orang (87,50%) yang bekerja, sisanya 12,50% tidak bekerja (menganggur). Data ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah angkatan yang bekerja dan peningkatan angkatan kerja yang menganggur sepanjang tahun 2008-2017.

Pada sisi lain, perekonomian Kota Kupang tumbuh positif dengan angka yang relatif tinggi, yaitu 6,83% pada tahun 2017. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT (5,16%). Demikian pula belanja daerah Kota Kupang mengalami peningkatan yang cukup besar sepanjang tahun 2008-2017. Pada tahun 2008, belanja daerah sebesar Rp. 468,62 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp. 1,156 triliun (Kota Kupang DA, 2009 dan 2018).

Temuan awal tentang kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah di Kota Kupang, tampaknya berbeda dengan dua hasil penelitian terdahulu (Hendarmin, 2012; Harijono dan Utama, 2013). Namun demikian, sampai sejauhmana perbedaan tersebut signifikan secara statistik, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Karena itu, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kinerja belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kota Kupang.

Dalam perspektif ekonomi makro, belanja pemerintah (*government spending*) terdiri dari belanja pemerintah untuk barang dan jasa serta transfer (Samuelson and Nordhaus, 1987; Branson, 1989; Case and Fair, 2009). Belanja pemerintah (G) dan pengeluaran untuk *transfer payment* (Tr) dapat diubah-ubah, sehingga mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Mengingat belanja pemerintah bersifat injeksi yaitu mengalirkan uang ke dalam masyarakat, maka meningkatnya pengeluaran agregat akan mendorong peningkatan permintaan agregat, sehingga melalui *multiplier effect* belanja pemerintah, pendapatan nasional akan meningkat (Lipsey, et al, 1995; Dernburg, 1995).

Kesempatan kerja adalah bagian dari permintaan agregat yang meningkat akibat meningkatnya pengeluaran agregat (belanja pemerintah); sementara itu kesempatan kerja juga merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong perluasan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya menciptakan kesempatan kerja baru. Dengan pemahaman teoretis demikian, maka hipotesis yang hendak diuji adalah belanja daerah berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Kota Kupang sebagai satuan analisis, dengan mengamati perkembangan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dalam rentang waktu 2008-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu, yang bersumber dari publikasi BPS Kota Kupang dalam bentuk Kota Kupang Dalam Angka, tahun 2009-2018. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan program aplikasi statistik (SPSS) untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini belanja daerah diberlakukan sebagai independen variabel, pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variabel dan kesempatan kerja sebagai dependen variabel. Koefisien regresi akan dihitung dengan model regresi linier, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan *margin of error* ($\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak bila $p \leq 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana tampak pada **Tabel 1**, belanja daerah di kota Kupang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2008-2017, yaitu dari Rp. 468,62 milyar menjadi Rp. 1,16 trilyun, atau rata-rata tumbuh 10,75% per tahun. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi memperlihatkan *trend* menurun, yaitu dari 7,45% (2008) menjadi 6,83% (2017); sedangkan kesempatan kerja yang dilihat dari angkatan kerja yang sedang bekerja sedikit berfluktuasi pada tingkat 51,73% (2008) menjadi 51,63% (2017).

Tabel 1 Perkembangan Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kota Kupang, 2008-2017

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Juta)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Angkatan Kerja yang Bekerja (%)
2008	468,618	7.45	51.73
2009	484,470	7.13	51.43
2010	557,614	7.84	52.31
2011	592,900	8.26	57.60
2012	674,178	7.34	52.17
2013	796,473	7.58	52.21
2014	902,402	6.81	49.47
2015	992,066	6.63	46.43
2016	1,173,242	6.74	46.64
2017	1,156,828	6.83	51.63

Sumber: BPS, Kota Kupang DA 2009-2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ($0,265 > p > 0,05$; terima H_0).
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja ($0,019 < p < 0,05$; tolak H_0).
3. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja ($0,063 > p > 0,05$; terima H_0).

Berdasarkan hasil pengujian di atas, hipotesis yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterima. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel intervening, karena tidak dipengaruhi oleh belanja daerah, tetapi lebih tepat berfungsi sebagai variabel independen, karena berpengaruh terhadap kesempatan kerja sebagai variabel dependen. Dengan demikian kedudukan belanja

daerah sebagai variabel independen tidak signifikan secara statistik, karena selain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, juga tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja.

Hasil analisis ini menunjukkan pola yang berbeda dengan hubungan logis secara teoretis, dimana belanja daerah sebagai variabel independen seharusnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Mengingat pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari investasi sebagaimana didalilkan dalam model pertumbuhan Harrod-Domar (Todaro dan Smith, 2003), dan investasi yang dimaksud dapat berasal dari pengeluaran swasta dan pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal tetap bruto, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kupang sepanjang tahun 2008-2017 lebih banyak dipengaruhi investasi swasta. Belanja pemerintah yang terus meningkat sepanjang tahun 2008-2017, tampaknya tidak mengarah pada pembentukan modal tetap bruto, sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Belanja daerah yang tidak mengarah pada pembentukan modal tetap bruto (infrastruktur ekonomi) tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dari komposisi belanja daerah berdasarkan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sepanjang tahun 2008-2017, rata-rata porsi belanja tidak langsung sebesar 61,72% dan belanja langsung sebesar 38,28%. Dari komposisi belanja seperti ini, tampak bahwa orientasi belanja pemerintah lebih dominan pada belanja untuk kepentingan birokrasi dibanding kepentingan pembangunan infrastruktur ekonomi. Jika disimak lebih lanjut lagi berdasarkan komposisi belanja langsung yang terdiri dari belanja barang jasa, belanja modal dan belanja pegawai, rata-rata porsi belanja modal sepanjang tahun 2008-2017 hanya sebesar 16,54% dari total belanja daerah. Dengan porsi belanja modal sebesar ini, infrastruktur ekonomi yang dapat dibangun relatif terbatas, bahkan tidak bersesuaian dengan kebutuhan dunia usaha, yang pada gilirannya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan kesempatan kerja, jika dilihat menurut status pekerjaan utama, angkatan kerja yang bekerja pada pekerjaan dengan status berusaha sendiri (tanpa bantuan buruh maupun dengan buruh tetap dan tidak tetap hanya sebesar 28,59%; sementara yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 63,33%; sisanya adalah angkatan kerja yang bekerja dengan status sebagai pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga atau tanpa upah tetap (Kota Kupang DA, 2018). Data ini menunjukkan bahwa, salah satu hambatan kecilnya angkatan kerja yang bekerja dengan status berusaha sendiri adalah kurangnya infrastruktur ekonomi.

Selain itu, bila dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja yang menganggur, 79,26% berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Pengangguran angkatan kerja berpendidikan tinggi ini disebabkan mereka tidak dibekali dengan *technical skill* yang memadai pada jenjang pendidikan formal. Untuk melengkapi mereka dengan *technical skill* yang memadai, pemerintah dapat berperan melalui penyelenggaraan pendidikan non-formal. Namun demikian, alokasi belanja modal yang sangat kecil tersebut menjadikan pemerintah daerah tidak dapat membiayai penyelenggaraan pendidikan non-formal bagi angkatan kerja berpendidikan tinggi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan hasil analisis di atas, disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi yang ditempatkan sebagai intervening variabel ternyata tidak berfungsi menghubungkan belanja daerah dan kesempatan kerja. Bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesempatan kerja, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi lebih tepat menjadi variabel independen.

Selain itu disimpulkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kupang sepanjang tahun 2008-2017, lebih banyak didorong oleh investasi swasta. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, disebabkan belanja daerah tidak mengarah pada pembentukan modal tetap bruto dan pembentukan modal manusia. Hal ini terbukti dari minimnya angkatan kerja yang bekerja dengan status bekerja sendiri dan besarnya porsi pengangguran yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak dilengkapi *technical skill* memadai. *Technical skill* ini sejatinya diperoleh melalui pendidikan non formal, tetapi alokasi belanja modal yang terbatas menjadikan pemerintah kurang memberi perhatian pada penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut.

Dengan demikian, untuk meningkatkan keefektifan belanja daerah dalam menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, porsi belanja modal harus diperbesar dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembentukan modal manusia melalui pendidikan non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, William. H., 1989. *Macroeconomic Theory and Policy*, third edition, London: Harper and Row.
- Case, Karl E., dan Ray C. Fair., 2009. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, edisi kelima, Jakarta: Indeks.
- Dernburg, Thomas. F., 1994. *Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan*, edisi ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- Diulio, Eugene. A., 1993. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Erlangga.
- Harijono, Gatot Setio dan I Made Suyana Utama., 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fak. Ekonomi – UDAYANA Bali*, Vol. II, No. 2 .
- Hendarmin.,2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat*,*Jurnal Eksos_Fak. Ekonomi UNTAN*.
- Lipsey, Richard G., Paul N. Courant., Douglas D. Purvis., Peter O. Steiner., 1995. *Makro Ekonomi*, edisi kesepuluh, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mahmudi., 2017. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPPN STIM YKPN.
- Samuelson, Paul A and William D. Nordhaus., 1987. *Economics*, twelfth edition, Singapore: McGraw Hill.
- Todaro, Michael. P dan Stephen C. Smith., 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan, Jakarta: Erlangga.